SENJATA PEMUSNAH MASSAL DAN MASA DEPAN KEAMANAN INTERNASIONAL

Adi Joko Purwanto, S.Ip, MA

Abstract

This article tries to explore the dynamics of international security, especially the ownership of weapons mass destruction (WMD). Recently the issue of weapons mass destruction remains a critical issue in international security. Many countries around the world use nuclear power as a powerful weapon for deterrence and defense from possible enemy attack, nuclear also able to serve as bargaining position, and Taking profits in other fields (eg. economics and politics). Yet the ownership of weapons of mass destruction turned out to leave the problems. one of them is the future of international security.

Keywords: international security, weapons of mass destruction, nuclear proliferation, the balance of power, nuclear diplomacy.

A. Pendahuluan

Pada tanggal 8 April 2010 bertempat di Kastil Praha dua pemimpin negara besar, Presiden Dmitry Medvedev dari Russia dan Presiden Barack Obama dari Amerika Serikat, menandatangani traktat mengenai pembatasan kepemilikan senjata nuklir START (*strategic arms reduction treaty*).[1] Pasca penandatanganan traktat tersebut selanjutnya diteruskan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Keamanan Nuklir yang berlangsung di Washington DC pada tanggal 14 april 2010. Penandatanganan perjanjian tersebut meneruskan kerjasama antara kedua negara mengenai pembatasan kepemilikan peluru kendali berkepala nuklir yang sudah berlangsung selama 2 dekade sejak tahun 1991. Dua negara tersebut merupakan negara terbanyak dalam kepemilikan peluru kendali atau senjata nuklir

[1] www.suaramerdeka.com diakses pada 18 april 2010 pukul 23.15 wib

yang ada di dunia, Sehingga penting bagi Amerika Serikat dan Russia untuk saling menjaga hubungan dan pengertian mengenai program nuklir diantara keduanya. Sedangkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Keamanan Nuklir lebih mengaskan kembali mengenai keseriusan negara-negara yang memiliki persenjataan nuklir dan masuk dalam *Non-Proliferation of Nuclear* (NPT) untuk membatasi dan melucuti kepemilikan senjata nuklirnya, salah satunya adalah Israel yang belum menandatangani traktat tersebut.

Isu kepemilikan dan pengembangan peluru kendali atau senjata nuklir yang selanjutnya lebih dikenal dengan WMD (*weapons of mass destruction*) dimana didalamya meliputi kepemilikan senjata kimia, senjata biologi dan senjata nuklir itu sendiri telah menjadi fenomena yang menarik dalam politik keamanan internasional kontemporer khususnya pasca berakhirnya era perang dingin yang melibatkan dua negara *super power* Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Data dari sebuah lembaga penelitian internasional yang fokus dalam kajian keamanan internasional SIPRI *(stockholm international peace research institute*) pada tahun 2008 mencatat terdapat 9 negara (*nuclear weapons states*) yang menyimpan serta memiliki senjata nuklir aktif. Kesembilan negara tersebut adalah Russia, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina, India, Israel, Pakistan dan Korea Utara. Dari kesembilan negara tersebut Russia dan Amerika Serikat memiliki senjata terbanyak yaitu 16.000 buah senjata nuklir dimiliki Russia dan 10.000 senjata nuklir dimiliki oleh Amerika Serikat, sehingga sangat penting bagi kedua negara tersebut untuk melakukan kerjasama dan perjanjian bilateral mengenai

pembatasan (*arms control*) dan perlucutan (*disarmament*) senjata nuklir.[2]

Secara sederhana kita dapat memahami dari pengertian *Arms Control and Disarmament Arms Control* atau pembatasan kepemilikan senjata merujuk pada sebuah upaya yang dilakukan oleh *nuclear weapons states* (NWS) untuk membatasi pertumbuhan perkembangan kepemilikan senjata nuklir serta menekan untuk menggunakannya. Dengan kata lain pembatasan kepemilikan senjata nuklir adalah memanajemen perlombaan senjata khusunya senjata nuklir di antara negara-negara di dunia yang berpotensi memiliki serta mengembangkan senjata nuklir yang dapat berdampak pada dilema keamanan internasional. Usaha dalam melakukan pembatasan kepemilikan senjata nuklir dapat dilakukan melalui bentuk-bentuk kerjasama bilateral maupun multilateral. Sedangkan mengenai pengertian *Disarmament* memiliki ruang lingkup yang lebih kecil yaitu usaha pelucutan maupun pengurangan kepemilikan senjata nuklir terhadap negara-negara yang sudah memiliki dan menyimpan senjata nuklir.

B. SENJATA PEMUSNAH MASAL DAN PROLIFERASI NUKLIR

Isu tentang pengembangan senjata nuklir merupakan salah satu bagian dari beberapa isu poltik dunia di era globalisasi dan telah melewati batas – batas wilayah. Isu tentang perkembangan nuklir sebenarnya sudah menjadi pembicaraan global sejak tahun 1945. sejak saat itu isu dari perkembangan senjata nuklir telah menjadi komoditas hubungan antara militer dan politik. Salah satu kasus yang pernah mencuat ke

[2] Estimates of nuclear weapons in the possessions of known nuclear weapon states in "*Security Studies An Introduction*" Paul D. Williams, Routledge, New york, 2008, Hal.391

permukaan internasional yaitu kasus " krisis kuba " yang pada intinya adalah ketegangan tentang penempatan seperangkat senjata nuklir antara Uni Sovyet dan Amerika Serikat. Pembatasan kepemilikan tentang senjata nuklir atau yang dikenal dengan *Non-Proliferation of Nuclear* (NPT) merupakan salah satu isu terpenting dalam proliferasi nuklir. Proliferasi nuklir sendiri adalah sebuah suatu proses atau bentuk diplomasi antar negara (Cina, Perancis, Amerika serikat, Inggris) yang berusaha untuk membatasi kepemilikan senjata nuklir dan negara – negara tersebut mempunyai potensi untuk melakukan pengembangan nuklir serta mempunyai kemampuan untuk meluncurkan dan menempatkan senjata nuklir yang dapat memicu terjadinya perang. Senjata nuklir sendiri termasuk dalam kategori senjata pemusnah masal (*weapon mass destruction*) .

Motivasi dan kepemilikan senjata nuklir oleh negara-negara yang ada di dunia ini sudah berlangsung sejak lama. Jauh sebelum perang dingin berakhir beberapa negara berupaya untuk mengembangkan program nuklir dan memilki senjata nuklir. Terdapat tiga buah alasan penting yang memotivasi mereka untuk memiliki senjata pemusnah masal tersebut. Ketiga hal tersebut adalah alasan Strategi, Politik dan Prestis. Alasan strategi karena senjata nuklir memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mengamankan negara mereka dari serangan musuh dari luar, hal tersebut sesuai dengan konsep *deterrence* yaitu sebuah upaya untuk mencegah ancaman militer dari pihak lain agar tidak melakukan tindakan agresif atau serangan militer dengan istilah lain *war prevention* dan hal tersebut lebih berfokus pada *pshycological war* daripada bersifat fisik.

Sedangkan untuk alasan politik dan prestis negara yang memiliki senjata nuklir secara sederhananya berupaya untuk meningkatkan negaranya dalam percaturan politik internasional.[3]

Contoh paling nyata dari ketiga alasan tersebut adalah pengembangan program dan kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara. Motivasi Korea Utara mengembangkan senjata nuklirnya dalam alasan strategi adalah untuk mengisi kekosongan senjata konvensionalnya dan mencegah serangan dari agresor asing sedangkan alasan politik dan prestis kepemilikan nuklir Korea Utara lebih dilandasi pada sikap Korea Utara untuk menaikan nilai tawar (*bargaining position*) dalam percaturan politik internasional. Serta perimbangan kekuatan kawasan Asia Timur (*balance of region*) dan Korea Utara berupaya untuk merubah peta kekuatan yang ada di kawasan tersebut.

Salah satu dampak dari berakhirnya perang dingin pada tahun 1990-an di bidang keamanan internasional adalah meredanya konflik bahaya penggunaan peluru kendali dengan berhulu ledak nuklir antara Uni Sovyet dengan Amerika Serikat. Meski demikian ancaman tentang senjata nuklir tidak seketika hilang karena kedua negara tersebut masih menyimpan sebagian besar senjata nuklirnya di gudang-gudang senjata militer yang dimiliki. Menurunnya bahaya perang nuklir antara bekas dua negara adidaya tersebut ternyata memunculkan isu maupun permasalahan baru dewasa ini (*baca:pasca perang dingin*) yaitu seputar senjata pemusnah masal (*weapons of mass destruction*). Permasalahan baru yang muncul adalah pengembangan

[3] Waheguru Pal Singh Sidhu, "*Nuclear Proliferation"*, in "*Security Studies An Introduction*" Paul D. Williams, Routledge, New york, 2008.

(*proliferation*) senjata nuklir oleh negara-negara yang dahulu tidak memiliki sama sekali untuk mengembangkan program senjata nuklir seperti Iran dan Korea Utara. Penyebab terkuat terjadinya hal tersebut adalah penyebaran senjata nuklir berserta teknologinya pada masa era perang dingin masih berlangsung ke beberapa negara serta wilayah di penjuru dunia ini yang dilakukan oleh dua kekuatan *super powers*.

Terdapat dua perspektif mengenai perkembangan senjata nuklir (*nuclear proliferation*) dalam agenda keamanan internasional kontemporer. Pandangan yang pertama adalah muncul dari negara-negara yang sudah memiliki senjata nuklir seperti Amerika Serikat dan Russia. Negara-negara tersebut berusaha untuk mencegah upaya negara-negara lain di dunia ini untuk memperoleh senjata nuklir yang selanjutnya pandangan dari negara-negara tersebut dikenal dengan *horizontal proliferation*. Pandangan yang kedua muncul dari negara-negara seperti India,Iran,Pakistan dan Korea Utara yang berpandangan pentingnya membangun persenjataan nuklir sebagai alat pencegah untuk menangkal serangan dari luar dan selanjutnya kelompok ini disebut dengan *vertical proliferation*. [4]

Fenomena ketegangan seputar krisis nuklir yang mencuat kepermukaan dewasa ini seperti yang terjadi di Iran dan semenanjung Korea sesungguhnya merupakan krisis yang berada dalam tingkat *vertical proliferation.* Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran serta ketidakpercayaan dari negara-negara yang masuk dalam

[4] Little, Ricahrd and Michael Smith, *Issues in World Politics second edition*, Hound mills, Basingstoke Palgrave, Newyork, 2001

horizontal proliferation terhadap upaya pengembangan program senjata nuklir oleh negara-negara dalam kelompok *vertical proliferation*. Mereka merasa bahwa negara-negara tersebut memiliki teknologi serta sumber daya manusia yang rendah dalam pengembangan program nuklir sehingga nantinya dapat membahayakan keamanan internasional. Selain hal tersebut adanya tekanan dari *horizontal proliferation* yang mempunyai kepentingan untuk menghambat laju kepemilikan senjata nuklir dari negara – negara yang termasuk dalam *vertical proliferation*. Amerika Serikat dan Russia sendiri sebagai negara *horizontal proliferation* masih menyimpan senjata pemusnah masal atau kapal selam maupun senjata *land-based ballistic missile* yang mempunyai jangkauan antar benua.

Fenomena sekitar sengketa senjata pemusnah masal memang memunculkan kekhawatiran di berbagai kalangan internasional dan perlu sebuah upaya untuk mengatasinya. Terdapat 3 buah pendekatan yang dikemukakan oleh Waheguru Pal Singh Sidhu untuk mengatasi permasalahan tersebut. *Pertama*, Pendekatan penyelesaian krisis senjata pemusnah masal melalui kerjasama multilateral berbasis perjanjian internasional seperti *Partial Test Ban Treaty* (1963), *NPT* (1968) dan *CTBT* (1996). Dalam kerangka penyelesaian yang berbentuk traktat dan masuk ke dalam perjanjian internasional ini, Secara norma dan prinsip hukum internasional sangat kuat, Akan tetapi bentuk ini cenderung lemah ke dalam arah penegakan apabila ada pihak-pihak yang tidak mematuhi isi dari traktat tersebut. Sehingga dibutuhkan komitmen yang sangat tinggi bagi pihak-pihak yang masuk kedalam perjanjian tersebut. *Kedua*, Penyelesaian

melalui deklarasi atau resolusi (*non-treaty*) yang dibentuk oleh UN *Security Council* (UNSC) UN *General Assembly* (UNGA). Bentuk penyelesaian seperti ini memiliki dua alasan utama yaitu : mencari kesepahaman dengan pihak-pihak *non-state actors* dan memberikan masukan kepada perjanjian-perjanjian berbentuk traktat apabila didalam isi perjanjian dirasa masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Penyelesaian bentuk *ketiga* adalah yang diprakarsai oleh pemimpin sebuah negara atau beberapa kelompok negara (*non-convensional approaches*), seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak pada era George W.Bush melalui *preventive war* dengan membentuk *Proliferation Security Initiative* (PSI) untuk mengatasi senjata kimia dan biologi yang di jalankan oleh Irak pada tahun 2003.[5]

Upaya penanganan dan pembatasan seputar kepemilikan senjata pemusnah masal maupun senjata nuklir menjadi salah satu isu terpenting dalam masalah keamanan internasional kontemporer. Beberapa negara di dunia sangat aktif melakukan kerjasama yang intensif mengatasi permasalahan tersebut khususnya negara-negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara, Asia bagian Tengah, Afrika dan Amerika Latin. Upaya tersebut mereka wujudkan dalam menciptakan kawasan bebas nuklir yaitu *Nuclear-Weapon-free Zone* (NWFZ). Meski demikian berbeda dengan wilayah-wilayah yang berusaha mensterilkan dari senjata nuklir, beberapa wilayah lainnya semakin intensif meningkatkan kemampuan senjata nuklir seperti wilayah Asia Selatan (India dan Pakistan) dan Asia Timur bagian Utara (Korea Utara dan Cina) yang melakukan program *Nuclearization* yaitu mengakuisisi

[5] Waheguru Pal Singh Sidhu, *Op.cit,hal 371,2008.*

persenjataan nuklir mereka serta melakukan serangkaian uji coba rudal balistik yang memiliki kepala hulu ledak nuklir.

C. DIPLOMASI DAN MASA DEPAN NUKLIR DUNIA

Kesadaran baru yang muncul dalam isu instabilitas keamanan internasional adalah masalah diplomasi nuklir. Perkembangan tentang program nuklir, serta tindakan tentang pembatasan perkembangan senjata nuklir atau yang disebut dengan *Non-Proliferation of Nuclear* (NPT) telah menjadi suatu isu internasional yang tidak bisa dilepaskan dari bentuk – bentuk praktik diplomasi. Isu tentang kepemilikan senjata nuklir tidak hanya terjadi pada negara – negara *super power* seperti Amerika Serikat atau China tetapi juga telah melibatkan banyak negara yang termasuk dalam negara yang tidak tergolong seperti hal tersebut seperti Korea Utara atau Iran. Program tentang kepemilikan nuklir juga menjadi sebuah perdebatan, bahwa pengembangan program nuklir tidak hanya pada proses pembuatan senjatah pemusnah lain akan tetapi program nuklir juga meripakan sebuah proyek ekonomi yang bertujuan untuk pengembangan energi seperti klaim Iran atas kepemilikan program nuklirnya.

Diplomasi nuklir dalam sejarahnya berawal dari tahun 1955 ketika terjadi pembicaraan bilateral antara Uni Sovyet dan Amerika Serikat tentang pembatasan kepemilikan senjata pemusnah masal. Hal tersebut berlanjut hingga tahun 1972 ketika kedua negara tersebut sepakat untuk duduk bersama dalam suatu proses negosiasi atau diplomasi tentang masalah pembatasan senjata nuklir yang kemudian menghasilkan sebuah traktat yaitu *Anti-Ballistic Misille Treaty*.

Pertemuan pada tahun 1972 terkenal dengan nama SALT (*strategic arms limitation talks*) yang bertujuan untuk melakukan pembatasan senjata nuklir kedua belah pihak yaitu Amerika Serikat dan Uni Sovyet.

Selanjutnya isu – isu tentang nuklir pada perkembangannya tidak bersifat bilateral tetapi multilateral dan melibatkan banyak pihak internasional serta lembaga atau institusi internasional yaitu *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Forum *six-talks party* merupakan sebuah bentuk diplomasi yang lazim kita dengar. Forum tersebut merupakan kelanjutan dari forum *three-talks party* sebagai sebuah upaya proses diplomasi penyelesaian kasus nuklir semenajung Korea yang terus mengalami kebuntuan hingga akhirnya Cina melakukan upaya memperluas pembicaraan dengan melibatkan beberapa negara antara lain Russia, Jepang dan Korea Selatan.[6]

Terdapat tiga buah tantangan terhadap masa depan nuklir dunia. *Pertama*, Tantangan yang muncul dari negara-negara yang masuk kedalam *Non-Proliferation of Nuclear* (NPT). Mundurnya Korea Utara dari *non-proliferation treaty of nuclear weapons* (*NPT*) serta disertai serangkaian uji coba peluru kendali merupakan sebuah tantangan yang dapat mengancam instabilitas keamanan internasional di masa yang akan datang. Bukan hal yang mustahil kedepan krisis tersebut dapat memicu perang terbuka di kawasan Asia Timur mengingat sejarah dari wilayah ini yang pernah terlibat perang saudara pada sekitar tahun 1950-an. Apalagi kemampuan dari peluru kendali Taepodong-2 buatan Korea

[6] Kyung-Ae Park, North Korea in 2003: *Pendulum Swing between Crisis and Diplomacy*, Asian Survey, Vol. 44, No. 1, (Jan. - Feb., 2004), University of California Press.

Utara mampu menjangkau wilayah terjauh dari Amerika Serikat.

Bentuk tantangan yang *kedua,* adalah berasal dari negara-negara yang belum menandatangani *non-proliferation treaty of nuclear weapons* (*NPT*) seperti Israel,India dan Pakistan. Serta negara-negara yang belum meratifikasi traktat tersebut seperti Amerika Serikat, Cina, Mesir dan Iran. Banyak faktor negara-negara tersebut belum menandatangani atau meratifikasi trakta tersebut mulai dari faktor politik dalam negeri sampai dengan faktor prestis dalam menciptkan perimbangan kekuatan di kawasan mereka. Negara-negara yang belum masuk ke dalam rezim NPT terus saja mengembangkan program nuklirnya yang disertai uji coba peluru kendali. Hal tersebut akan selalu menimbulkan kecemasan dan dunia akan selalu dibayang-bayangi terjadingan perang. Selain itu negara-negara yang masuk dalam NPT dan belum meratifikasi, pelucutan senjata nuklir yang mereka miliki seperti Amerika Serikat dan Russia juga tidak signifikan hanya sebagian kecil saja yang dilucuti dan senjata nuklir lainnya mereka simpan di gudang-gudang persenjataan mereka. Dan tantangan *ketiga* yang tidak kalah pentingnya berasal dari *non-state actors*, Seperti kelompok-kelompok teroris terbatas yang turut serta dalam pengembangan senjata nuklir.[7]

Melihat realitas mengenai dinamika seputar pengembangan dan kepemilikan senjata nuklir yang telah dikemukan diatas. Sesungguhnya masa depan keamanan dunia dalam kondisi yang abu-abu atau dalam kondisi yang serba tidak pasti antara perang atau damai. Di satu perspektif kondisi ini justru sangat menguntungkan dunia karena

[7] Waheguru Pal Singh Sidhu, *Op.cit,hal 364,2008.*

negara-negara yang memiliki senjata nuklir tidak terlibat secara langsung dalam perang terbuka. Sebagai aktor internasional yang rasional mereka sadar apabila senjata nuklir diluncurkan dan terjadi perang maka kerugian yang timbul akan sangat besar. Kondisi ini mengigatkan kita ketika terjadinya perang dingin berlangsung. Dalam perspektif lain dunia harus bersih dari keberadaan senjata nuklir sehingga kecemasan serta suasana ketidakpastian akan perdamaian di dunia dapat dihilangkan. Dengan kata lain masa depan nuklir dunia dan keamanan internasional akan sangat tergantung pada negara-negara yang memiliki senjata nuklir. Keamana dunia akan dapat terwujud apabila *share of power* seimbang diantara negara-negara di dunia ini.

Referensi :

D. Williams, Paul, *Security Studies An Introduction,* Routledge, New york, 2008

Kyung-Ae Park, North Korea in 2003: *Pendulum Swing between Crisis and Diplomacy*, Asian Survey, Vol. 44, No. 1, (Jan. - Feb., 2004), University of California Press.

Little, Richard and Michael Smith, *Issues in World Politics second edition*, Hound mills, Basingstoke,mPalgrave, Newyork, 2001

Victor D. Cha and David C. Kang, *The Korea Crisis*, Foreign Policy, No. 136 (May - Jun., 2003), Carnegie Endowment for International Peace.

Howlett, Darryl, *Nuclear Proliferatinon dalam The Globalization of World Politic*s, Jhon Baylis and steve Smith, Oxford University Press, Newyork, 2005.